

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SINGKAWANG MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SINGKAWANG MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SINGKAWANG
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022**

ISSN: 2621-8682

Nomor Publikasi: 6172.2309

Katalog BPS: 9302023.6172

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: x + 67 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Ilustrasi Gambar Kulit dan Infografis:

freepik.com

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Dicetak Oleh:

CV. Zafa Anugerah Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SINGKAWANG
MENURUT PENGELUARAN
2018 – 2022**

Penanggungjawab Umum:

Suminar Kristiani, SE., ME

Penanggungjawab Teknis:

Suminar Kristiani, SE., ME

Editor:

Sakuntala Devi Ayu, SST, M.Si.

Penulis dan Pengolahan Data:

Siti Ainia Hidayati, S.Tr.Stat.

Desain/Layout dan Infografis:

Siti Ainia Hidayati, S.Tr.Stat.

Pemeriksa Tabel:

Sakuntala Devi Ayu, SST, M.Si.

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran 2018-2022 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan BPS Kota Singkawang. Dalam publikasi ini disajikan perkembangan perekonomian Kota Singkawang secara deskriptif.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir sesuai dengan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Kami menyadari, bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Singkawang, April 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SINGKAWANG**



SUMINAR KRISTIANI, SE., ME.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional.....	3
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	6
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	12
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	14
2.5. Perubahan Inventori.....	19
2.6. Ekspor Impor	22
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SINGKAWANG	25
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kota Singkawang Menurut Pengeluaran.....	26
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	31
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	32
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	33
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	36
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	37
3.7. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	38
3.8. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	39
3.9. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	40
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB KOTA SINGKAWANG	
TAHUN 2018-2022	42
4.1. PDRB (Nominal).....	43
4.2. Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	44

	Halaman
4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.....	45
4.4. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	47
4.5. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	48
4.6. Perbandingan PDRB terhadap Impor.....	49
4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	49
4.8. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	50
4.9. Rasio Perdagangan Internasional (RPI).....	52
4.10. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	53
PENUTUP	55
LAMPIRAN	57

<https://singkawangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (Miliar Rupiah), 2018-2022	27
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (Miliar Rupiah), 2018-2022	27
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (%), 2018-2022	29
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (%), 2018-2022	30
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Singkawang, 2018-2022	30
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Singkawang, 2018-2022	31
Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Singkawang, 2018-2022.....	33
Tabel 8. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Singkawang, 2018-2022	34
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Singkawang, 2018-2022.....	36
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Singkawang, 2018-2022	37
Tabel 11. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kota Singkawang, 2018-2022	38
Tabel 12. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kota Singkawang, 2018-2022	39
Tabel 13. Nilai PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Singkawang, 2018-2022	44
Tabel 14. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2018-2022.....	45
Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2018-2022.....	46
Tabel 16. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Singkawang, 2018-2022	47
Tabel 17. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2018-2022.....	48
Tabel 18. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Singkawang, 2018-2022	49
Tabel 19. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Singkawang, 2018-2022 ..	50

Tabel 20. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Singkawang, 2018-2022	52
Tabel 21. Rasio Perdagangan Internasional Kota Singkawang, 2018-2022.....	52
Tabel 22. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kota Singkawang, 2018-2022	54

<https://singkawangkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (Miliar Rupiah), 2018-2022	28

<https://singkawangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022 (Juta Rupiah).....	58
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022 (Juta Rupiah).....	59
Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022 (persen).....	60
Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022 (persen).....	61
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022 (persen).....	62
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022 (persen).....	63
Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022.....	64
Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022.....	65
Lampiran 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Singkawang, 2018-2022.....	66
Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Singkawang, 2018-2022 (persen).....	67

BAB I

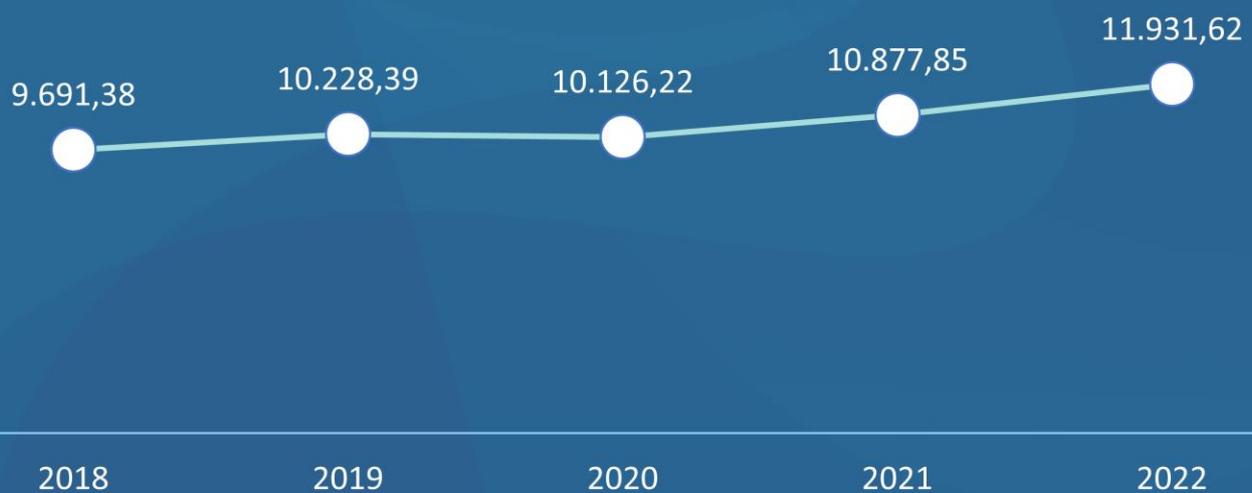
PENDAHULUAN



**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Singkawang
Tahun 2022**

11.931,62 Miliar Rupiah

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang Tahun 2018-2022



—●— PDRB ADHB (dalam miliar Rupiah)



1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Menurut konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Singkawang
Tahun 2022**

7.330,03 Miliar Rupiah



**Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022**



2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan Minuman Tidak Beralkohol;
2. Minuman Beralkohol, Tembakau, dan Narkotik;
3. Pakaian dan Alas Kaki;
4. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya;
5. Furnitur, Perlengkapan Rumah Tangga dan Pemeliharaan Rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/Hiburan dan Kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan Makan Minum dan Penginapan/Hotel; dan
12. Barang dan Jasa Lainnya.

Namun, karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran; dan
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- b. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- c. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- d. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut;
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga;

- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah;
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan;
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun;
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu; dan
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

2.2.1. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll;
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya;
- c. Penyusutan; dan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data
 - a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP)

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

b. Hasil updating direktori LNPRT

Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

dengan

\bar{x}_{ij} = Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} = PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i = Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i = Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j = Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

dengan

X = PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i =Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADBK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan

yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

2.3.3. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup: PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.

2.3.4. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kab/Kota Tahunan adalah

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu);
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu);
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS);
- d. Output Bank Indonesia (BI); dan
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

- a. PK-P Kabupaten/kota atas dasar harga berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten/Kota, PK-P Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut ditambah pengeluaran pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten atas dasar harga konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau

barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian untuk kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota;
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat;
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level kabupaten/kota);
 - d. Laporan keuangan perusahaan;
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level kabupaten;

- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar;
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas);
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum;
- i. Publikasi Statistik Konstruksi;
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sementara itu, PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sementara itu, data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar;
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh;
- c. Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.3. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- e. Data komoditas perkebunan;

- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku

diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

2.6.1. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.
- c. Net Ekspor antar daerah (Ekspor dan impor antar daerah).

2.6.4. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kab/kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten/kota dari hasil survei;
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

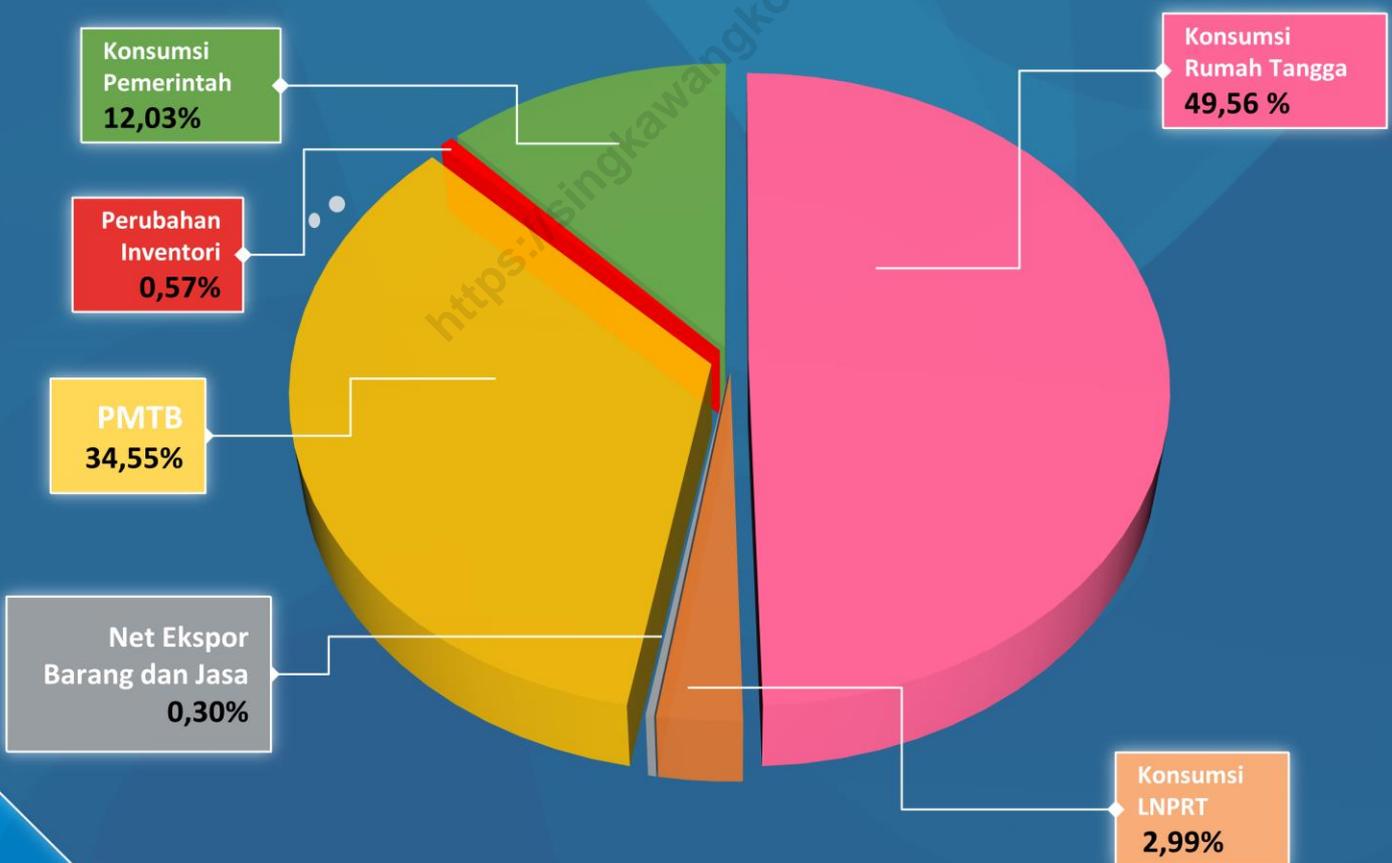
2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sementara itu, Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sementara itu, net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SINGKAWANG

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Tahun 2022



Perekonomian Kota Singkawang dari sisi pengeluaran menggambarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa yang tercipta di wilayah Kota Singkawang digunakan oleh sektor domestik (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan swasta) untuk memenuhi permintaan akhir, serta diperdagangkan ke luar wilayah. Sebagian besar produk barang dan jasa digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT dan pemerintah. Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kemudian, sebagian lagi dijual ke luar wilayah Kota Singkawang sebagai ekspor, dikurangi dengan produk barang dan jasa dari luar wilayah yang digunakan untuk memenuhi permintaan domestik (impor).

Perubahan struktur ekonomi Kota Singkawang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018-2022, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara itu, faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Perekonomian Kota Singkawang pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,05 persen, sementara itu Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan Kota Singkawang didorong oleh pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SINGKAWANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Singkawang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari PDRB pada tahun 2022 yang meningkat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi dapat dilihat dari terjadinya pembangunan ekonomi, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (Juta Rupiah), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.861.389,56	5.152.511,53	5.210.872,04	5.405.649,95	5.913.015,27
2. Konsumsi LNPRT	294.212,49	314.320,64	315.285,89	326.476,90	356.889,41
3. Konsumsi Pemerintah	1.237.056,42	1.310.898,63	1.378.017,34	1.452.573,15	1.434.963,40
4. PMTB	3.595.613,66	3.777.212,65	3.692.258,72	3.886.405,02	4.122.376,22
5. Perubahan Inventori	55.699,12	56.555,48	45.334,70	49.376,57	67.860,71
6. Ekspor	2.489.211,05	2.743.738,78	2.572.266,45	3.128.625,02	3.651.036,50
7. Impor	2.841.797,83	3.126.847,21	3.087.810,16	3.371.259,91	3.614.522,62
PDRB	9.691.384,46	10.228.390,50	10.126.224,98	10.877.846,70	11.931.618,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Peningkatan ekonomi suatu wilayah digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Kota Singkawang atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hampir di seluruh aspek perekonomian. Pasca Pandemi COVID-19, perekonomian Kota Singkawang mulai beranjak pulih pada tahun 2021, dilihat dari adanya peningkatan nilai PDRB-nya.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (Juta Rupiah), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.357.568,96	3.518.102,36	3.541.615,89	3.640.990,86	3.797.484,36
2. Konsumsi LNPRT	175.588,97	185.086,15	178.341,92	180.387,34	188.298,86
3. Konsumsi Pemerintah	889.642,71	934.151,47	937.609,19	941.198,31	896.653,19
4. PMTB	2.535.057,45	2.628.677,13	2.520.680,49	2.582.924,35	2.636.047,33
5. Perubahan Inventori	31.996,20	40.029,90	30.959,12	32.878,57	43.143,25
6. Ekspor	1.548.759,12	1.632.993,47	1.534.521,96	1.684.773,97	1.922.621,07
7. Impor	1.998.393,62	2.110.653,40	2.086.683,37	2.085.378,92	2.154.215,26
PDRB	6.540.219,80	6.828.387,08	6.657.045,20	6.977.774,48	7.330.032,80

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Singkawang berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan pada tahun 2022.

Dari grafik di bawah, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Gambar 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (Miliar Rupiah), 2018-2022



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (%), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,16	50,37	51,46	49,69	49,56
2. Konsumsi LNPRT	3,04	3,07	3,11	3,00	2,99
3. Konsumsi Pemerintah	12,76	12,82	13,61	13,35	12,03
4. PMTB	37,10	36,93	36,46	35,73	34,55
5. Perubahan Inventori	0,57	0,55	0,45	0,45	0,57
6. Ekspor	25,68	26,82	25,40	28,76	30,60
7. Impor	29,32	30,57	30,49	30,99	30,29
PDRB	100	100	100	100	100

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa selama periode 2018-2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Ekspor mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 25 hingga 31 persen produk Kota Singkawang mampu menembus pasar luar Singkawang, baik masih dalam negeri maupun luar negeri. Demikian halnya impor sudah mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 29 hingga 31 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari luar Singkawang. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 34 hingga 37 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 12 hingga 14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, selama lima tahun terakhir perdagangan Kota Singkawang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor. Pada tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih rendah dari nilai impor sehingga kecenderungan perdagangan antar pulau dan internasional Kota Singkawang dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”, sebaliknya pada tahun 2022 menunjukkan posisi “surplus”.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Singkawang (%), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,67	4,78	0,67	2,81	4,30
2. Konsumsi LNPRT	6,45	5,41	(3,64)	1,15	4,39
3. Konsumsi Pemerintah	4,58	5,00	0,37	0,38	(4,73)
4. PMTB	3,82	3,69	(4,11)	2,47	2,06
5. Perubahan Inventori	27,13	25,11	(22,66)	6,20	31,22
6. Ekspor	5,17	5,44	(6,03)	9,79	14,12
7. Impor	4,47	5,62	(1,14)	(0,06)	3,30
PDRB	4,64	4,41	(2,51)	4,82	5,05

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang dari tahun 2018 hingga 2022 secara rata-rata mencapai 3,35 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 4,64 persen (2018); 4,41 persen (2019); -2,51 persen (2020); 4,82 persen (2021); dan 5,05 persen (2022). Pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,05 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-2,51 persen).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Singkawang, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	144,79	146,46	147,13	148,47	155,71
2. Konsumsi LNPRT	167,56	169,82	176,79	180,99	189,53
3. Konsumsi Pemerintah	139,05	140,33	146,97	154,33	160,04
4. PMTB	141,84	143,69	146,48	150,47	156,38
5. Perubahan Inventori	174,08	141,28	146,43	150,18	157,29
6. Ekspor	160,72	168,02	167,63	185,70	189,90
7. Impor	142,20	148,15	147,98	161,66	167,79
PDRB	148,18	149,79	152,11	155,89	162,78

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data di bawah, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan pada tahun 2022 walaupun terjadi penurunan jumlah rumah tangga akibat dari pemulihan pandemi COVID-19.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Singkawang, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	4.861,39	5.152,51	5.210,87	5.405,65	5.913,02
b. ADHK 2010	3.357,57	3.518,10	3.541,62	3.640,99	3.797,48
Proporsi terhadap PDRB (%)	50,16	50,37	51,46	49,69	49,56
Rata-rata Konsumsi per Ruta/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	92.400,77	97.528,18	101.048,56	95.443,79	110.664,31
b. ADHK 2010	63.817,55	66.591,63	68.678,56	64.286,44	71.071,35
Rata-rata Konsumsi per Kapita/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	22.191,94	23.114,76	22.167,89	22.723,22	24.487,88
b. ADHK 2010	15.327,10	15.782,61	15.066,60	15.305,29	15.726,72
Pertumbuhan (%)					
a. Total Konsumsi Ruta	4,67	4,78	0,67	2,81	4,30
b. Per Ruta	1,41	4,35	3,13	(6,40)	10,55
c. Per Kapita	2,87	2,97	(4,54)	1,58	2,75
Jumlah Ruta	52.612	52.831	51.568	56.637	53.432
Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.061	222.910	235.064	237.891	241.467

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan pola meningkat, kemudian menurun di tahun 2021 hingga 2022. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 51,43 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 49,56 persen.

Masa pemulihan pandemi COVID-19 telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa pandemi COVID-19. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2018, secara umum seluruh rumah tangga di Kota Singkawang menghabiskan dana sekitar 4.861,39 miliar rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 5.152,51 miliar rupiah (2019); 5.210,87 miliar rupiah (2020); 5.405,65 miliar rupiah (2021); dan pada tahun 2022 menjadi 5.913,02 miliar rupiah.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK adalah sebesar 4,67 persen pada 2018. Pada tahun 2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK meningkat sebesar 4,78 persen. Namun, pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga ADHK mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 0,67 persen. Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga ADHK meningkat sebesar 2,81 persen. Selanjutnya, pada tahun 2022 pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK kembali meningkat sebesar 4,30 persen.

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kota Singkawang, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. ADHB	294,21	314,32	315,29	326,48	356,89
b. ADHK 2010	175,59	185,09	178,34	180,39	188,30
Proporsi terhadap PDRB (%)	3,04	3,07	3,11	3,00	2,99

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Konsumsi LNPRT ADHB pada tahun 2018 sebanyak 294,21 miliar rupiah dan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 314,32 miliar rupiah (2019); 315,29 miliar rupiah (2020); 326,48 miliar rupiah (2021); dan 356,89 miliar rupiah (2022).

Kontribusi konsumsi LNPRT terhadap PDRB ADHB pada tahun 2018 hingga 2022 pada kisaran 2,99 persen hingga 3,11 persen. Kontribusi yang relatif kecil ini dikarenakan kegiatan lembaga non profit dalam perekonomian tidak terlalu signifikan seperti halnya konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Singkawang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 8. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Singkawang, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.237,06	1.310,90	1.378,02	1.452,57	1.434,96
b. ADHK 2010	889,64	934,15	937,61	941,20	896,65
Proporsi terhadap PDRB (%)	12,76	12,82	13,61	13,35	12,03
Rata-rata Konsumsi per Pegawai/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	363.305,85	389.684,49	414.565,99	461.573,93	445.640,81
b. ADHK 2010	261.275,39	277.690,69	282.072,56	299.077,95	278.463,72
Rata-rata Konsumsi per kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	5.647,09	5.880,84	5.862,31	6.106,05	5.942,69
b. ADHK 2010	4.061,16	4.190,71	3.988,74	3.956,43	3.713,36
Pertumbuhan (%)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	4,58	5,00	0,37	0,38	(4,73)
b. Per Pegawai	10,17	6,28	1,58	6,03	(6,89)
c. Per kapita	2,78	3,19	(4,82)	(0,81)	(6,14)
Jumlah Pegawai	3.405	3.364	3.324	3.147	3.220
Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.061	222.910	235.064	237.891	241.467

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK pada tahun 2018-2021. Namun, pada tahun 2022 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.237,06 miliar rupiah kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2021 nilainya mencapai 1.452,57 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB mengalami penurunan sebesar 1.434,96 miliar rupiah. Secara ADHK, total konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan pada tahun 2018-2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan maupun penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB ADHB terus mengalami peningkatan dari 12,76 persen tahun 2018 menjadi 13,35 persen di tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 12,03 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2020.

Pada prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan

bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 5.647,09 ribu rupiah dan meningkat hingga tahun 2019 sebesar 5.880,84 ribu rupiah. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 5.862,31 ribu rupiah lalu meningkat di tahun 2021 sebesar 6.106,05 ribu rupiah. Namun, kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 5.942,69 ribu rupiah (tabel 8).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK juga menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2018 dan 2019, sementara pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan (tabel 8). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan konsumsi per kapitanya yang sebesar 2,78 persen pada tahun 2018 kemudian mengalami percepatan pada tahun 2019 sebesar 3,19 persen. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan hingga mencapai pertumbuhan negatif menjadi -4,82 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita kembali mengalami perlambatan pada tahun 2021 menjadi -0,81 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, laju pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah mengalami perlambatan sebesar -6,14 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 363.305,85 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 8). Namun pada tahun 2022 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah menurun menjadi 445.640,81 ribu rupiah. Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021 dan menurun pada tahun 2022. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 10,17 persen. Sementara pada tahun 2020 mengalami perlambatan pada tahun 2021 menjadi -6,89 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada

tahun 2019, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5 persen; konsumsi per kapita sebesar 6,28 persen; dan konsumsi per pegawai sebesar 3,19 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah daerah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah daerah mengalami penurunan dari 3.405 orang (2018) menjadi 3.220 orang (2022). Sebaliknya, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari sejumlah 219.061 ribu orang pada tahun 2018 menjadi 241.467 ribu orang pada tahun 2022. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah daerah dalam kurun waktu tersebut cenderung meningkat, masing-masing adalah 64,34 (2018); 66,26 (2019); 70,72 (2020); 75,59 (2021); dan 74,99 (2022). Hal ini berarti pada tahun 2018, setiap satu pegawai pemerintah daerah melayani sekitar 64 penduduk dan pada tahun 2022 menjadi sekitar 74 penduduk.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Dengan kata lain dapat diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Singkawang, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	3.595,61	3.777,21	3.692,26	3.886,41	4.122,38
b. ADHK 2010	2.535,06	2.628,68	2.520,68	2.582,92	2.636,05
Proporsi terhadap PDRB (%)	37,10	36,93	36,46	35,73	34,55
Pertumbuhan (%)	3,82	3,69	(4,11)	2,47	2,06

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -4,11 persen sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu

sebesar 3,82 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan PMTB selama tahun 2018 – 2022 adalah sebesar 1,59 persen.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan/atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori belum banyak dikaji dengan lebih detail. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Singkawang, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (Miliar Rp)					
a. ADHB	55,70	56,56	45,33	49,38	67,86
b. ADHK 2010	32,00	40,03	30,96	32,88	43,14
Proporsi terhadap PDRB (%)	0,57	0,55	0,45	0,45	0,57

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada Tahun 2018 perubahan inventori ADHB adalah sebesar 55,70 miliar rupiah dan mengalami peningkatan tahun 2019 mencapai 56,56 miliar rupiah. Pada tahun 2020, perubahan inventori mengalami penurunan mencapai 45,33 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2021, perubahan inventori meningkat menjadi 49,38 miliar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 67,86 miliar rupiah. Sementara untuk proporsinya terhadap PDRB, sepanjang periode 2018 sampai 2022 berkisar antara 0,45 persen hingga 0,57 persen.

3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsuler), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, nilai ekspor tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, nilai ekspor ADHB mencapai 228,84 miliar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 445,48 miliar rupiah.

Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, proporsi komponen ini dalam PDRB cenderung tidak banyak mengalami perubahan, yaitu berkisar 2,36 persen sampai 3,73 persen. Pada tahun 2018 proporsi ekspor adalah sebesar 2,36 persen kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya yakni sebesar 2,36 persen (2019); 2,79 persen (2020); 3,02 persen (2021); dan 3,73 persen (2022).

**Tabel 11. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Kota Singkawang, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor (Miliar Rp)					
a. ADHB	228,84	241,71	282,88	328,75	445,48
b. ADHK 2010	148,23	149,37	169,60	188,97	246,71
Proporsi terhadap PDRB (%)	2,36	2,36	2,79	3,02	3,73
Pertumbuhan (%)	5,96	0,77	13,55	11,42	30,55

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.8. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Singkawang. Oleh karena itu, untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non-residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Singkawang terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Singkawang di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 12. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Kota Singkawang, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor (Miliar Rp)					
a. ADHB	441,45	511,26	397,56	247,16	255,06
b. ADHK 2010	245,69	262,77	203,44	133,79	134,56
Proporsi terhadap PDRB (%)	4,56	5,00	3,93	2,27	2,14
Pertumbuhan (%)	3,94	6,95	(22,58)	(34,24)	0,58

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 12 di atas menunjukkan pola perkembangan impor luar negeri Kota Singkawang pada periode tahun 2018 hingga 2022 yang fluktuatif. Perkembangan nilai impor ADHB sempat mengalami peningkatan dari 441,45 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 511,26 miliar rupiah pada tahun 2019. Lalu mengalami penurunan menjadi 397,56 miliar rupiah pada tahun 2020 dan mengalami penurunan kembali menjadi 247,16 miliar rupiah. Pada tahun 2022 impor ADHB sedikit meningkat menjadi 255,06 miliar rupiah.

Proporsi impor LN pada tahun 2018 adalah sebesar 4,56 persen dan meningkat pada tahun 2019. Kemudian proporsi impor LN mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2022. Proporsi komponen impor pada tahun 2019 adalah sebesar 5,00 persen; 3,93 persen di tahun 2020; 2,27 persen di tahun 2021; dan 2,14 persen di tahun 2022.

Di sisi lain, secara riil nilai impor LN mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, terjadi pertumbuhan yang positif sebesar 3,94 persen lalu mengalami peningkatan menjadi 6,95 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 impor LN memiliki pertumbuhan negatif sebesar -22,58 persen dan kembali mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021 sebesar -34,24 persen. Pada tahun 2022, impor LN kembali mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 0,58 persen.

3.9. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah (dalam series PDRB adh konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “negatif” berarti nilai impor antar daerah lebih besar dari pada ekspor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini, untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor-impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity*

balance. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<https://singkawangkota.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA SINGKAWANG

Pertumbuhan Ekonomi
Kota Singkawang
Tahun 2022

5,05 %



Pertumbuhan Ekonomi
Kota Singkawang Tahun 2018-2022



Agregat dari PDRB merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu aktivitas dari keseluruhan ekonomi. Agregat tersebut merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Analisis perkembangan agregat PDRB digunakan dalam analisis sosial ekonomi suatu wilayah yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor. Demikian juga perbandingan antara nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB pengeluaran merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi impor barang dan jasa. Dengan demikian, PDRB ini dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, penduduk, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan satu wilayah dapat didekati dengan nilai dari data PDRB per kapita.

Seiring dengan peningkatan nilai total PDRB Kota Singkawang, maka PDRB per kapita juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 13), meskipun dari sisi jumlah penduduk mengalami peningkatan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Singkawang secara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 13. Nilai PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	9.691,38	10.228,39	10.126,22	10.877,85	11.931,62
b. ADHK 2010	6.540,22	6.828,39	6.657,05	6.977,77	7.330,03
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	44.240,57	45.885,74	43.078,59	45.726,18	49.413,04
b. ADHK 2010	29.855,70	30.632,93	28.320,14	29.331,81	30.356,25
Pertumbuhan (%)					
a. PDRB	4,64	4,41	(2,51)	4,82	5,05
b. PDRB per kapita	2,84	2,60	(7,55)	3,57	3,49
c. Penduduk	1,75	1,76	5,45	1,20	1,50
Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.061	222.910	235.064	237.891	241.467

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Kota Singkawang di tahun 2018 mencapai 44.240,57 ribu rupiah dan meningkat hingga mencapai 49.413,04 ribu rupiah di tahun 2022. Pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” cenderung melambat dari 2,84 persen di tahun 2018 hingga mencapai pertumbuhan negatif sebesar 7,55 persen di tahun 2020, tetapi mengalami percepatan sebesar 3,57 persen pada tahun 2021 dan kembali melambat sebesar 3,49 persen di tahun 2022. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata sebesar 2,33 persen setiap tahunnya.

4.2. PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri dari konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian juga perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain serta barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Hal ini memberikan gambaran dari produk yang dihasilkan di wilayah tersebut, seberapa besar untuk konsumsi dan seberapa besar yang digunakan untuk ekspor.

Kontribusi konsumsi rumah tangga Kota Singkawang sangat dominan dalam PDRB pengeluaran, yaitu sekitar 50 persen, artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Singkawang sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun, besaran yang dikonsumsi rumah tangga di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 14. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Miliar Rp)	4.861,39	5.152,51	5.210,87	5.405,65	5.913,02
2. Total Ekspor ADHB (Miliar Rp)	2.489,21	2.743,74	2.572,27	3.128,63	3.651,04
3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	1,95	1,88	2,03	1,73	1,62

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, konsumsi akhir rumah tangga mencapai 4.861,39 miliar rupiah dan meningkat hingga mencapai 5.913,02 miliar rupiah di tahun 2022. Demikian pula dengan nilai ekspor Kota Singkawang di tahun 2018 mencapai 2.489,21 miliar rupiah dan meningkat hingga 3.651,04 miliar rupiah di tahun 2022.

Selama kurun waktu 2018-2022, perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dengan ekspor menunjukkan bahwa rata-ratanya mencapai 1,84. Hal ini memberikan gambaran bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di wilayah Kota Singkawang mencapai hampir dua kali lipat dari produk yang digunakan untuk ekspor.

Secara implisit data di atas menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan nilai ekspor juga semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB atau rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB (investasi).

Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode waktu tertentu ditambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Singkawang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Adapun untuk PMTB masih tertinggal, dimana total PMTB hanya sebesar 7/10 dari nilai total konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Miliar Rp)	4.861,39	5.152,51	5.210,87	5.405,65	5.913,02
2. Total PMTB ADHB (Miliar Rp)	3.595,61	3.777,21	3.692,26	3.886,41	4.122,38
3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1,35	1,36	1,41	1,39	1,43

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung meningkat tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021. Rata-rata rasio selama kurun waktu 2018-2022 sebesar 1,35 yang artinya hasil produk yang telah dihasilkan Kota Singkawang yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga mencapai 1,39 kali lipat dibanding yang digunakan untuk investasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat investasi yang berasal dari produk wilayah sendiri masih jauh dibandingkan yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Perkembangan nilai rasio ini dari sebesar 1,35 pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,41 pada tahun 2020. Selanjutnya mengalami penurunan menjadi 1,39 pada tahun 2021. Semakin menurunnya rasio ini memberikan gambaran bahwa perkembangan nilai investasi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,43. Semakin meningkatnya rasio ini memberikan gambaran bahwa perkembangan nilai investasi tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen).

Pelaku konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga. Pengeluaran rumah tangga untuk tempat tinggal masuk ke dalam pembentukan modal tetap bruto.

Tabel 16. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir PDRB (Miliar Rp)	6.392,66	6.777,73	6.904,18	7.184,70	7.704,87
a. Rumah Tangga	4.861,39	5.152,51	5.210,87	5.405,65	5.913,02
b. LNPRT	294,21	314,32	315,29	326,48	356,89
c. Pemerintah	1.237,06	1.310,90	1.378,02	1.452,57	1.434,96
PDRB ADHB	9.691,38	10.228,39	10.126,22	10.877,85	11.931,62
Proporsi terhadap PDRB (%)	65,96	66,26	68,18	66,05	64,58

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 proporsi total konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah yang mencapai 64,85 persen, sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga diikuti konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tetapi proporsinya terhadap PDRB tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2018, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mencapai 65,96 persen kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 68,18 persen. Selanjutnya, mengalami penurunan menjadi 66,05 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 64,58 persen. Hal ini memberikan

gambaran bahwa pembentukan PDRB selain oleh konsumsi, komponen lainnya seperti komponen dari PMTB dan ekspor tumbuh dengan baik.

4.5. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antar residen dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri. Perbandingan ekspor terhadap PMTB memberikan gambaran seberapa besar hasil dari produk wilayah tersebut digunakan untuk ekspor dan PMTB.

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan modal (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB). Jika rasionya lebih kecil dari 1, memberikan gambaran bahwa hasil produk wilayah lebih banyak digunakan untuk investasi daripada untuk ekspor.

Tabel 17. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Ekspor ADHB (Miliar Rp)	2.489,21	2.743,74	2.572,27	3.128,63	3.651,04
2. Total PMTB ADHB (Miliar Rp)	3.595,61	3.777,21	3.692,26	3.886,41	4.122,38
3. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	0,69	0,73	0,70	0,81	0,89

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara umum, dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ekspor mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB. Namun, jika dilihat dari rasio keduanya, proporsi ekspor terhadap PMTB justru cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 (Tabel 17). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB terutama selama 2018-2020.

Pada tahun 2018, rasio ekspor terhadap PMTB sebesar 0,69 kemudian meningkat menjadi 0,73 (2019); menurun menjadi 0,70 (2020); selanjutnya terus meningkat menjadi 0,81 (2021); dan 0,89 (2022). Nilai rata-rata rasio ekspor terhadap PMTB sepanjang periode

tersebut adalah sebesar 0,76 atau di bawah 1 (Tabel 20) yang artinya produk yang digunakan untuk ekspor lebih kecil daripada yang digunakan untuk investasi (PMTB).

4.6. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain termasuk luar negeri. Jika rasio menurun menunjukkan ketergantungan impor semakin tinggi sebaliknya jika rasio meningkat maka menunjukkan ketergantungan terhadap impor semakin rendah.

Tabel 18. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total PDRB ADHB (Miliar Rp)	9.691,38	10.228,39	10.126,22	10.877,85	11.931,62
2. Total Impor ADHB (Miliar Rp)	2.841,80	3.126,85	3.087,81	3.371,26	3.614,52
3. Perbandingan PDRB terhadap Impor	3,41	3,27	3,28	3,23	3,30

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2018 sebesar 3,41 kemudian menurun hingga mencapai 3,27 pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 3,28 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Rasio PDRB terhadap impor menurun hingga mencapai 3,23 kemudian meningkat hingga 3,30 pada tahun 2022. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2018 (3,41) disebabkan oleh peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor cenderung konstan.

4.7. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Total penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam ekonomi yang berasal dari produksi domestik atau impor sehingga total penyediaan ini merupakan penjumlahan dari output dengan impor. Adapun keseimbangan antara total penyediaan dengan permintaan adalah keseimbangan antara total output.

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel di bawah, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 29 sampai 31 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 71 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 9.691,38 miliar rupiah (2018) menjadi sebesar 11.931,62 miliar rupiah (2022).

Tabel 19. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
a. PDRB ADHB (Miliar Rp)	6.849,59	7.101,54	7.038,41	7.506,59	8.317,10
Persentase (%)	70,68	69,43	69,51	69,01	69,71
b. Impor ADHB (Miliar Rp)	2.841,80	3.126,85	3.087,81	3.371,26	3.614,52
Persentase (%)	29,32	30,57	30,49	30,99	30,29
Total Permintaan	9.691,38	10.228,39	10.126,22	10.877,85	11.931,62

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Di sisi lain, “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing 6.849,59 miliar rupiah (2018); 7.101,54 miliar rupiah (2019); 7.038,41 miliar rupiah (2020); 7.506,59 miliar rupiah (2021); dan 8.317,10 (2022). Oleh karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor dengan nilai masing-masing tahun sebesar 2.841,80 miliar rupiah (2018); 3.126,85 miliar rupiah (2019); 3.087,81 miliar rupiah (2020); 3.371,26 miliar rupiah (2021); dan 3.614,52 miliar rupiah (2022).

4.8. NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2018-2022, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Singkawang dengan luar negeri dan antar daerah selalu menunjukkan nilai negatif tetapi pada tahun 2022 menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Singkawang selalu dalam posisi defisit kurun waktu 2018-2021 dan mengalami surplus pada tahun 2022. Nilai ekspor luar negeri yang lebih besar dari impor luar negeri menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “tabungan luar negeri”. Akan tetapi di sisi lain kemampuan produksi dalam wilayah Kota Singkawang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari yang berakibat adanya tuntutan untuk melakukan impor dari luar yang masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai impor dalam negeri yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi ini mengakibatkan perdagangan Kota Singkawang menjadi defisit. Defisit perdagangan Kota Singkawang yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan 2021 tercatat masing-masing sebesar 352,59 miliar rupiah (2018); 383,11 miliar rupiah (2019); 515,54 miliar rupiah (2020); dan 242,63 miliar rupiah (2021). Kemudian pada tahun 2022 mengalami surplus sebesar 36,51 miliar rupiah dimana nilai impor dalam negeri yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih rendah daripada nilai ekspornya. Sementara itu, rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 rasionya sebesar 0,88 kemudian stabil pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,83. Pada tahun 2021, rasio ekspor terhadap impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,93 dan kembali meningkat menjadi 1,01 pada tahun 2022.

Tabel 20. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Nilai Ekspor (Miliar Rp)	2.489,21	2.743,74	2.572,27	3.128,63	3.651,04
b. Nilai Impor (Miliar Rp)	2.841,80	3.126,85	3.087,81	3.371,26	3.614,52
c. Net Ekspor (X-M) (Miliar Rp)	(352,59)	(383,11)	(515,54)	(242,63)	36,51
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,88	0,88	0,83	0,93	1,01

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.9. RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 hingga 1 ($-1 < RPI < 1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 21. Rasio Perdagangan Internasional Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN (Miliar Rp)	228,84	241,71	282,88	328,75	445,48
Nilai Impor LN (Miliar Rp)	441,45	511,26	397,56	247,16	255,06
X - M (Miliar Rp)	(212,62)	(269,55)	(114,68)	81,59	190,42
X + M (Miliar Rp)	670,29	752,97	680,44	575,91	700,54
RPI	(0,32)	(0,36)	(0,17)	0,14	0,27

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2020 posisi ekspor LN selalu lebih rendah dari impor LN, namun pada periode tahun 2021-2022 posisi ekspor LN lebih tinggi dari impor LN. Nilai ekspor pada periode 2018-2022 tersebut terus meningkat dari 228,84 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 445,48 miliar rupiah pada tahun 2022. Di sisi lain, posisi impor LN mengalami peningkatan dari sebesar 441,45 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 511,26 miliar rupiah pada tahun 2019. Kemudian pada

tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 397,56 miliar rupiah hingga pada tahun 2021 menjadi 247,16 miliar rupiah. Pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan menjadi 255,06 miliar rupiah.

Rasio Perdagangan Internasional Kota Singkawang pada periode 2018-2020 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan impor, dengan rasio kisaran dari -0,32 sampai dengan -0,17. Sementara itu pada periode 2021-2022 Rasio Perdagangan Internasional Kota Singkawang didominasi oleh kegiatan ekspor dengan rasio kisaran dari 0,14 sampai dengan 0,27.

4.10. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio atau "ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "nilai tambah". Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dengan

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 22. *Incremental Capital Output Ratio* Kota Singkawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	6.540,22	6.828,39	6.657,05	6.977,77	7.330,03
b. Perubahan (Miliar Rp)	290,20	288,17	(171,34)	320,73	352,26
c. PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.535,06	2.628,68	2.520,68	2.582,92	2.636,05
ICOR	8,74	9,12	(14,71)	8,05	7,48

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR mengalami peningkatan dari 8,74 pada tahun 2018 menjadi 9,12 pada tahun 2019. Kemudian ICOR mengalami penurunan signifikan menjadi -14,71 di tahun 2020, dan kembali meningkat sebesar 8,05 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 besaran ICOR mengalami penurunan menjadi 7,48. Angka ICOR pada rentang 2018-2019 masih menunjukkan angka positif tetapi pada tahun 2020 menunjukkan angka negatif. Nilai ICOR pada tahun 2020 bernilai negatif karena nilai PDRB ADHK pada tahun 2020 lebih kecil daripada tahun 2019. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum dapat menghasilkan output secara optimal atau dapat dikatakan investasi yang ditanamkan pada tahun 2020 belum efisien pada tahun tersebut. Secara makro, kondisi ICOR bernilai negatif jarang terjadi. Namun, kondisi ini tidak dapat dihindari disebabkan munculnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun.

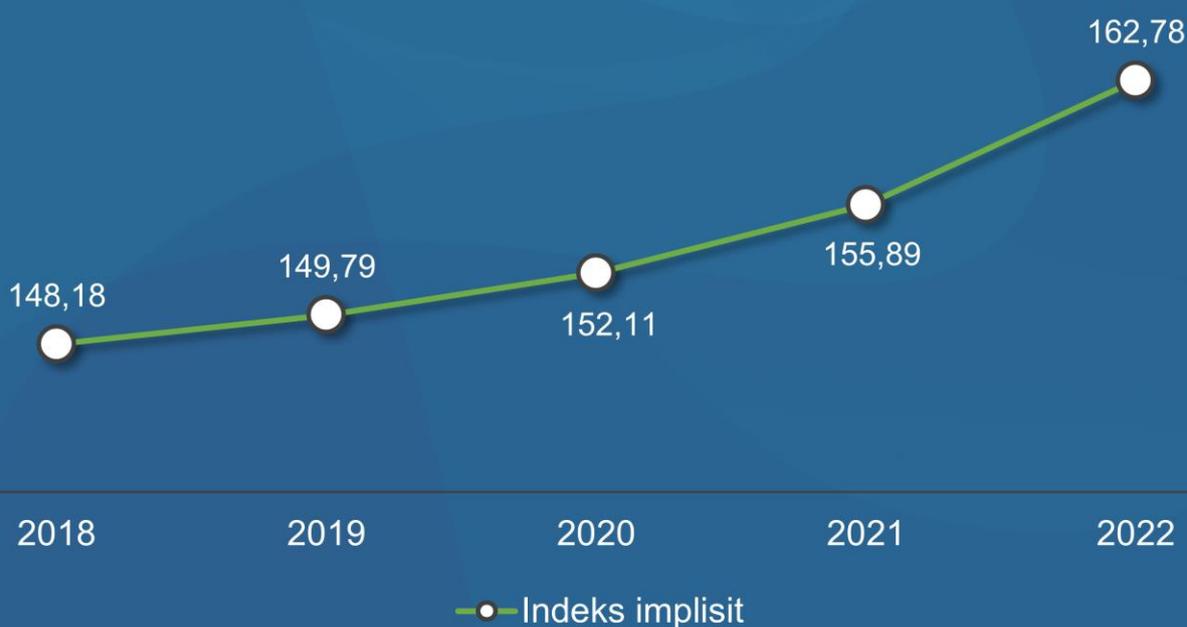
PENUTUP

Indeks Implisit
Kota Singkawang
Tahun 2022

162,78



Indeks Implisit
Kota Singkawang Tahun 2018-2022



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 hingga 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Singkawang pada periode yang bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 hingga 2022 sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Singkawang terhadap ekonomi daerah lain termasuk luar negeri (*rest of the country*).

LAMPIRAN



Lampiran 1. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.861.389,56	5.152.511,53	5.210.872,04	5.405.649,95	5.913.015,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	294.212,49	314.320,64	315.285,89	326.476,90	356.889,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.237.056,42	1.310.898,63	1.378.017,34	1.452.573,15	1.434.963,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.595.613,66	3.777.212,65	3.692.258,72	3.886.405,02	4.122.376,22
5. Perubahan Inventori	55.699,12	56.555,48	45.334,70	49.376,57	67.860,71
6. Ekspor Luar Negeri	228.838,09	241.711,73	282.880,24	328.749,39	445.479,68
7. Impor Luar Negeri	441.454,45	511.261,70	397.562,94	247.158,15	255.064,22
8. Net Ekspor Antar Daerah	(139.970,42)	(113.558,46)	(400.861,01)	(324.226,13)	(153.901,57)
PDRB	9.691.384,46	10.228.390,50	10.126.224,98	10.877.846,70	11.931.618,90

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.357.568,96	3.518.102,36	3.541.615,89	3.640.990,86	3.797.484,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	175.588,97	185.086,15	178.341,92	180.387,34	188.298,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	889.642,71	934.151,47	937.609,19	941.198,31	896.653,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.535.057,45	2.628.677,13	2.520.680,49	2.582.924,35	2.636.047,33
5. Perubahan Inventori	31.996,20	40.029,90	30.959,12	32.878,57	43.143,25
6. Ekspor Luar Negeri	148.227,92	149.370,40	169.604,09	188.972,34	246.705,38
7. Impor Luar Negeri	245.694,44	262.774,22	203.435,48	133.788,10	134.560,81
8. Net Ekspor Antar Daerah	(352.167,98)	(364.256,11)	(518.330,02)	(455.789,19)	(343.738,77)
PDRB	6.540.219,80	6.828.387,08	6.657.045,20	6.977.774,48	7.330.032,80

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,16	50,37	51,46	49,69	49,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,04	3,07	3,11	3,00	2,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,76	12,82	13,61	13,35	12,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,10	36,93	36,46	35,73	34,55
5. Perubahan Inventori	0,57	0,55	0,45	0,45	0,57
6. Ekspor Luar Negeri	2,36	2,36	2,79	3,02	3,73
7. Impor Luar Negeri	4,56	5,00	3,93	2,27	2,14
8. Net Ekspor Antar Daerah	(1,44)	(1,11)	(3,96)	(2,98)	(1,29)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,34	51,52	53,20	52,18	51,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,68	2,71	2,68	2,59	2,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,60	13,68	14,08	13,49	12,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,76	38,50	37,86	37,02	35,96
5. Perubahan Inventori	0,49	0,59	0,47	0,47	0,59
6. Ekspor Luar Negeri	2,27	2,19	2,55	2,71	3,37
7. Impor Luar Negeri	3,76	3,85	3,06	1,92	1,84
8. Net Ekspor Antar Daerah	(5,38)	(5,33)	(7,79)	(6,53)	(4,69)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,52	5,99	1,13	3,74	9,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,58	6,83	0,31	3,55	9,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,37	5,97	5,12	5,41	(1,21)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,73	5,05	(2,25)	5,26	6,07
5. Perubahan Inventori	4,28	1,54	(19,84)	8,92	37,44
6. Ekspor Luar Negeri	16,46	5,63	17,03	16,22	35,51
7. Impor Luar Negeri	12,76	15,81	(22,24)	(37,83)	3,20
8. Net Ekspor Antar Daerah	(9,04)	(18,87)	253,00	(19,12)	(52,53)
PDRB	7,53	5,54	(1,00)	7,42	9,69

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,67	4,78	0,67	2,81	4,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,45	5,41	(3,64)	1,15	4,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,58	5,00	0,37	0,38	(4,73)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,82	3,69	(4,11)	2,47	2,06
5. Perubahan Inventori	27,13	25,11	(22,66)	6,20	31,22
6. Ekspor Luar Negeri	5,96	0,77	13,55	11,42	30,55
7. Impor Luar Negeri	3,94	6,95	(22,58)	(34,24)	0,58
8. Net Ekspor Antar Daerah	2,42	3,43	42,30	(12,07)	(24,58)
PDRB	4,64	4,41	(2,51)	4,82	5,05

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Singkawang, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	215,05	227,93	230,51	239,12	261,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	409,13	437,10	438,44	454,00	496,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	222,86	236,16	248,26	261,69	258,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	250,95	263,63	257,70	271,25	287,72
5. Perubahan Inventori	149,22	151,52	121,45	132,28	181,80
6. Ekspor Luar Negeri	96,76	102,20	119,61	139,01	188,36
7. Impor Luar Negeri	317,26	367,43	285,72	177,63	183,31
8. Net Ekspor Antar Daerah	45,03	36,54	128,97	104,32	49,52
PDRB	233,85	246,81	244,34	262,48	287,91

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Singkawang, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	148,53	155,63	156,67	161,06	167,99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	244,18	257,38	248,00	250,85	261,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	160,27	168,29	168,91	169,56	161,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	176,93	183,47	175,93	180,27	183,98
5. Perubahan Inventori	85,72	107,24	82,94	88,08	115,58
6. Ekspor Luar Negeri	62,68	63,16	71,71	79,90	104,31
7. Impor Luar Negeri	176,57	188,85	146,20	96,15	96,71
8. Net Ekspor Antar Daerah	113,31	117,20	166,77	146,65	110,59
PDRB	157,81	164,77	160,63	168,37	176,87

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Kota Singkawang, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	144,79	146,46	147,13	148,47	155,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	167,56	169,82	176,79	180,99	189,53
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	139,05	140,33	146,97	154,33	160,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	141,84	143,69	146,48	150,47	156,38
5. Perubahan Inventori	174,08	141,28	146,43	150,18	157,29
6. Ekspor Luar Negeri	154,38	161,82	166,79	173,97	180,57
7. Impor Luar Negeri	179,68	194,56	195,42	184,74	189,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	39,75	31,18	77,34	71,14	44,77
PDRB	148,18	149,79	152,11	155,89	162,78

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Kota Singkawang, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,72	1,15	0,46	0,91	4,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,88	1,35	4,10	2,38	4,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,67	0,92	4,73	5,01	3,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,80	1,31	1,94	2,72	3,93
5. Perubahan Inventori	(17,98)	(18,84)	3,65	2,56	4,74
6. Ekspor Luar Negeri	9,90	4,82	3,07	4,30	3,80
7. Impor Luar Negeri	8,49	8,29	0,44	(5,47)	2,61
8. Net Ekspor Antar Daerah	(11,19)	(21,56)	148,07	(8,02)	(37,06)
PDRB	2,75	1,09	1,55	2,48	4,42

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten the Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SINGKAWANG**

Jl. Ahmad Yani No. 75 Pasiran, Singkawang Barat 79123,
Telp (0562) 631 334, Mailbox : bps6172@bps.go.id

